

Perkembangan Pola Migrasi Nelayan Ke Desa Muara Pantuan Dari Awal Abad Ke-19 Hingga Awal Dekade 1980

Ela Monika, Sainal, Muhammad Sopyan

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman

Email: ellamonica17@gmail.com, sainal@fkip.unmul.ac.id,
muhamad.sopyan@fkip.unmul.ac.id

Abstract: *This research analyzes the development of the migration patterns of fishermen to Muara Pantuan Village from the early 19th century to the early 1980s. The aim of this research is to understand the dynamics of fishermen's migration in the area during that period. Through historical research consisting of several stages, namely: (1) Heuristic, (2) Source Criticism, (3) Interpretation, and (4) Historiography. The result of this research is the migration of fishermen in Muara Pantuan Village, which occurred through three waves. The first wave occurred in the early 18th century, led by the Bugis people from Wajo'. They brought their civilization and traditions, and played a significant role in the formation of the region. The second wave occurred in the early 20th century, triggered by political and economic conflicts in the Paser Kingdom. The third wave occurred in the early 1970s until the late 1990s, influenced by economic and industrial developments in the Mahakam Delta region.*

Keywords : *Migration, Fishermen, Muara Pantuan.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis perkembangan pola migrasi nelayan ke Desa Muara Pantuan dari awal abad ke-19 hingga awal dekade 1980. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika migrasi nelayan di kawasan tersebut selama periode tersebut. Melalui penelitian sejarah (Historical Research) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu: (1) Heuristik, (2) Kritik Sumber, (3) Interpretasi, dan (4) Historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah migrasi masyarakat nelayan di Desa Muara Pantuan, terjadi melalui tiga gelombang. Gelombang pertama terjadi pada awal abad ke-18, dipimpin oleh orang-orang Bugis dari Wajo'. Mereka membawa peradaban dan tradisi mereka, serta memainkan peran penting dalam pembentukan wilayah tersebut. Gelombang kedua terjadi pada awal abad ke-20, dipicu oleh konflik politik dan ekonomi di Kerajaan Paser. Gelombang ketiga terjadi pada awal tahun 1970-an hingga menjelang 1990-an, dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan industri di kawasan Delta Mahakam.

Kata kunci : Migrasi, Nelayan, Muara Pantuan.

PENDAHULUAN

Migrasi telah menjadi fenomena yang dikenal dalam sejarah manusia, memperlihatkan dinamika perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan berbagai tujuan dan motivasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk menetap. Salah satu wilayah yang menarik untuk dipelajari terkait migrasi adalah kawasan Delta Mahakam. Teori-teori migrasi memberikan kerangka konseptual untuk memahami fenomena ini dari berbagai sudut pandang. Salah satu teori yang relevan adalah teori push-pull, yang mengajukan bahwa migrasi dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendorong (push) dari tempat asal dan faktor penarik (pull) dari tempat tujuan. Dalam konteks migrasi ke Delta Mahakam, faktor pendorong seperti ketidakstabilan politik, ekonomi, atau sosial di tempat asal, serta faktor penarik seperti peluang ekonomi atau keamanan di wilayah Delta Mahakam, mungkin memainkan peran penting. Sebelum menjadi pusat migrasi, kawasan Delta Mahakam telah memiliki peradaban yang kaya. Namun, menjadi perhatian khusus bahwa orang-orang Bugis, dengan keunikan dan keberaniannya, menjadi pelopor dalam mengekspansi wilayah ini. Kampung Pemangkarau menjadi bukti keberadaan peradaban Bugis paling awal di kawasan Delta Mahakam. Dengan mempertimbangkan kerangka konseptual dari berbagai teori

migrasi, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki proses migrasi ke Delta Mahakam secara lebih mendalam. Fokus penelitian akan diletakkan pada analisis faktor-faktor push dan pull yang mempengaruhi keputusan individu untuk bermigrasi, serta peran jaringan sosial dalam memfasilitasi migrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika migrasi dalam konteks kawasan Delta Mahakam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode sejarah. Metode historis adalah suatu metode yang mencoba mencari kejelasan tentang sejarah (Sjamsuddin, 2007). Hal ini dimaksudkan untuk menilai secara kritis keseluruhan hasil penelitian dan penyelidikan tersebut. Hasilnya kemudian akan menjadi pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta proses di masa depan. Tahapan metode penelitian sejarah menurut Helius Sjamsuddin terdiri dari tahap heuristik (pengumpulan sumber), kritik (pengujian kebenaran sumber), interpretasi (penafsiran data dan fakta sejarah), dan historiografi (penulisan atau pelaporan penelitian sejarah dengan merangkai fakta).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa migrasi berasal dari kata (mig-ra-si) yang berarti perpindahan penduduk dari satu tempat (negara dan sebagainya) ke tempat (negara dan sebagainya) lain

untuk menetap. Salah satu wilayah yang sangat strategis untuk melakukan migrasi adalah kawasan Delta Mahakam. Meskipun kawasan di wilayah Delta Mahakam telah memiliki peradaban, jauh sebelum orang-orang Bugis bermigrasi ke kawasan ini, namun orang-orang Bugis-lah yang pertama kali mengekspansi kawasan ini hingga ke pulau-pulau di dalam kawasan delta.

Kampung Pemangkarau menjadi bukti keberadaan peradaban Bugis paling awal di kawasan Delta Mahakam. Terdapat beberapa sumber yang menyebutkan bahwa orang-orang Bugis melakukan migrasi ke wilayah Delta Mahakam. Namun, tidak ada data yang spesifik mengenai jumlah orang Bugis yang bermigrasi ke wilayah tersebut. Sebuah artikel dari PPPM menyebutkan bahwa orang-orang Bugis masuk sebagai orang-orang yang memandang Delta Mahakam sebagai 'tanah seberang' yang menjanjikan. Selain itu, sebuah penelitian yang dilakukan di Delta Mahakam menunjukkan bahwa penduduk yang berpindah ke wilayah tersebut mencari lahan di wilayah Delta Mahakam, dan di antara mereka terdapat orang-orang Bugis. Selain itu, sebuah artikel dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa orang-orang Bugis berhasil membangun pemerintahan Bugis di Kalimantan Selatan pada tahun 1735 (Sarapang, 2017).

Meskipun tidak ada data yang spesifik mengenai jumlah orang-orang Bugis yang bermigrasi ke Delta Mahakam, informasi dari beberapa sumber menunjukkan bahwa migrasi orang-orang Bugis ke wilayah tersebut terjadi dan berkontribusi pada perkembangan wilayah tersebut. Selain itu terdapat data

yang mendukung migrasi orang Bugis ke wilayah Kalimantan. Menurut hasil sensus tahun 1930, jumlah orang Bugis yang bermigrasi ke Borneo (Kalimantan) sekitar 95.048 jiwa atau sekitar 60,29% dari jumlah migrasi orang Bugis. Selain itu, data sensus penduduk tahun 1930 juga menunjukkan bahwa penduduk dari suku Bugis menempati posisi kedua terbanyak di wilayah Keresidenan Borneo Bagian Selatan dan Timur. Data statistik dari Badan Pusat Statistik hasil sensus tahun 2010 juga menunjukkan bahwa suku Bugis yang menetap di Kalimantan Timur sebanyak 735.624 orang (Syarifuddin, 2021).

Dengan demikian, data tersebut memberikan bukti yang mendukung migrasi orang Bugis ke wilayah Kalimantan. Pada permulaan abad-18, seorang pangeran Wajo' bernama La Ma'dukelleng yang tidak mau tunduk pada pendudukan Arung Palakka yang disokong Belanda (pasca perjanjian Cappaya ri Bongaya atau yang disebut sebagai perjanjian perdamaian, yang telah disepakati pada 18 November 1667), meninggalkan Sulawesi Selatan bersama sekitar 3000 orang pengikutnya menuju Talake – Paser (Kalimantan Timur) (Timmer, 2010). Dalam kajian kontemporer, kepindahan orang Bugis Wajo ternyata juga disebabkan oleh penistaan dan penindasan yang dilakukan orang Bugis Bone atas mereka (yang membekas sebagai “dendam budaya”) dan ketidakmampuan mereka membayar ganti rugi peperangan sebesar 52.000 rijksdaalder (Andaya, 2004). Sembari berdagang, La Ma'dukelleng tinggal di pantai timur Kalimantan hingga 1737 dan kembali ke Wajo' sebagai Arung Matoa yang baru terpilih untuk melanjutkan peperangan melawan Bone dan Belanda.

Hebatnya, sebelum kembali ke tanah Wajo', La Ma'dukelleng ternyata sempat membina hubungan politik dengan penguasa setempat melalui pernikahan salah seorang putranya dengan putri Sultan Paser, pasangan ini memiliki anak perempuan yang kelak menikah dengan penguasa Kutai, Sultan Idris. Sementara putranya yang lain ia nikahkan dengan putri bungsu penguasa otonom wilayah Samarinda 49 yang bergelar Pua' Ado. Ini berarti La Ma'dukelleng tidak hanya meninggalkan pengaruhnya di tanah Kalimantan, namun juga meninggalkan sejumlah besar pengikutnya di Talake. Keturunan mereka inilah yang kemudian melakukan migrasi ke arah utara menuju Pamangkaran di sekitar Delta Mahakam yang strategis. Migrasi keturunan dari suku Bugis Talake diperkirakan berlangsung secara bergelombang sejak terjadinya konflik pemerintahan di Kerajaan Paser, pasca campur tangan Belanda dalam pengangkatan Sultan Muhammad Ali Alamsyah sebagai Sultan Paser pada 7 Juli 1885. Hingga pada akhirnya terjadi konflik antara Sultan terdahulu (Sultan Abdurachman Alamsyah) dengan Sultan Muhammad Ali Alamsyah yang didukung oleh Belanda.

Penguasaan Belanda atas kerajaan Paser, telah memaksa sebagian migran suku Bugis Wajo' yang tidak ingin tunduk pada Belanda, selain itu juga tidak ingin mengkhianati komitmen para pendahulu mereka, untuk hijrah ke tempat lain (Lenggono, 2015). Pada akhirnya gelombang migrasi tersebut mencapai puncaknya, ketika seorang saudagar kaya keturunan suku Bugis Wajo' bernama La Maraja yang memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Paser melakukan manuver politik, yaitu merencanakan

“perebutan kekuasaan” dengan dukungan Belanda. Akhirnya pada 8 Juli 1900 La Maraja berhasil menjadikan keponakannya Aji Meja bin Lataddaga sebagai Sultan Paser dengan gelar Sultan Ibrahim Khalihudin. Keadaan ini banyak memancing ketegangan di lingkungan kerajaan, banyak kaum bangsawan, kaum adat, 50 serta ulama yang tidak menyetujui pengangkatan sultan, sehingga mempengaruhi rakyat untuk tidak membayar pajak, hingga terjadi pembangkangan yang digerakkan oleh para bangsawan (Pemprop Kaltim, 1992).

Pada masa itulah terjadi gelombang migrasi besar-besaran keturunan Bugis yang telah menetap di Kerajaan Paser, karena merasa siri’ atau malu dengan keadaan tersebut, mereka kemudian memutuskan hijrah ke tempat lain. Banyak diantara mereka yang memilih bermigrasi ke arah utara pantai timur Kalimantan, salah satu tempat yang menjadi favorit mereka adalah kawasan disekitar Delta Mahakam, karena lokasinya sangat strategis, memiliki banyak lahan yang bisa digarap menjadi area pertanian atau perkebunan kelapa, serta memiliki potensi perikanan yang melimpah. Kampung Pamangkarang yang banyak disebut dalam tradisi lisan masyarakat setempat sebagai kampung pertama yang berhasil dibangun migran Bugis, menurut perkiraan kampung tua yang kini masuk ke dalam wilayah Desa Sepatin ini, telah berdiri pada kurun waktu tersebut.

Sesuai dengan temuan Lenggono (2004), yang berhasil menelusuri keberadaan sebuah nisan bertahun 1939 di area pekuburan yang masih relatif baru di belakang masjid Al-Anshor Desa Muara Pantuan. Padahal di

kawasan yang dulunya merupakan area perkebunan milik penduduk Pamangkaran tersebut, juga terdapat area pekuburan yang lebih tua di Tanjung Tengah yang belum teridentifikasi. Peta rupa bumi terbitan tahun 1934 buatan Pemerintah Hindia Belanda-pun telah mencantumkan nama Pamangkaran dan Muara Pantuan sebagai salah satu area pemukiman yang ada di kawasan Delta Mahakam. Lenggono (2004) mengungkapkan, “banyaknya komunitas asli Desa Muara Pantuan (sebuah tempat pemukiman baru yang dibangun komunitas Bugis Pamangkaran) yang memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat Talake di Kabupaten Pasir, namun mereka tidak lagi memiliki hubungan kekarabatan (missing link) dengan orang-orang di tanah leluhurnya Sulawesi Selatan”. Mereka kemudian membaaur dengan suku Bajo yang selalu berpindah-pindah dan migran Bugis dari Pangkajene yang diduga bermigrasi hampir bersamaan dengan kedatangan mereka ke Muara Pantuan menjelang abad-20. Kelak keturunan mereka inilah yang mengklaim sebagai penduduk pribumi Delta Mahakam, untuk membedakan mereka dengan migran Bugis yang datang belakangan.

Hingga pada masa revolusi fisik pasca kemerdekaan (1950 – 1965), mulai muncul lagi gelombang besar migrasi langsung dari Sulawesi ke kawasan Delta Mahakam. Motivasi kedatangan mereka ke Delta Mahakam adalah ingin menyelamatkan diri dari kekacauan ekonomi dan militer akibat pemberontakan Kahar Muzakkar serta mentaati nasehat yang diterima dari sanak saudara atau teman yang memberitakan adanya lokasi lain dimana kawasan hutannya bisa diubah menjadi lahan pertanian/perkebunan yang

menguntungkan. Alasan tersebut hampir sama dengan apa yang dikemukakan para migran Bugis yang berpindah ke Sumatera bagian selatan, seperti tersebut dalam Lineton (1975), juga di pinggiran kota Samarinda (disekitar Bukit Soeharto), seperti dijelaskan Vayda dan Sahur (1996) serta di sekitar kota Bontang. Kondisi ini menurut Matullada (1985; 1991), telah menyebabkan rendahnya angka pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan akibat besarnya jumlah penduduk yang berpindah ke daerah lain, baik pada masa-masa kekacauan (1950 – 1965) maupun oleh tabiat penduduk yang memiliki sifat suka merantau dan lain- lain.

Gelombang besar migrasi selanjutnya terjadi di awal tahun 1970-an hingga menjelang 1990, dilakukan tidak hanya oleh migran etnik Bugis dan Makassar yang berasal dari Sulawesi saja, namun juga melibatkan migran etnik Bugis dan Makassar yang telah menetap di Samarinda dan kota-kota lain di sekitar Delta Mahakam (pantai timur Kalimantan). Para migran tersebut berdatangan ke kawasan di sekitar Delta Mahakam, seiring perkembangan kawasan ini akibat aktifitas eksplorasi dan eksploitasi kegiatan migas, serta beroperasinya beberapa industri perikanan ekspor.

Laju migrasi di kawasan Delta Mahakam mencapai puncaknya pasca terjadinya “booms udang”, yang memicu kenaikan harga udang secara fantastis pada 1987/1998 dan diikuti dengan terjadinya ledakan penduduk di dalam kawasan Delta Mahakam. Kondisi ini juga diperumit dengan adanya fenomena “migrasi instan” oleh penduduk dari Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Samarinda Seberang dan desa-desa lain disekitar delta

Mahakam yang membuka/menjaga tambak-tambak baru dan berdomisili di dua tempat yang berbeda dengan memegang KTP ganda. Pembangunan di Desa Muara Pantuan ini mulai menggeliat saat dipimpin oleh H. Uton, Muara Pantuan berubah menjadi sebuah desa yang ramai dan semakin dinamis serta mulai diperhitungkan di kawasan Delta Mahakam.

Perkembangan pembangunan paling pesat di desa , juga terjadi diakhir kepemimpinan H. Uton, pada tahun 1997 – 1998, ketika terjadi booming harga udang. Saat itu Desa Muara Pantuan berhasil mencetak beberapa orang ponggawa menjadi milyuner-milyuner baru, sehingga banyak bermunculan rumah-rumah megah yang permanen dengan fasilitas mewah, bahkan banyak diantara mereka yang memiliki dua rumah sekaligus, satu di Desa Muara Pantuan dan yang lainnya di kota Samarinda. Salah satu kebijakan lokal yang sangat berpengaruh fatal bagi eksistensi hutan mangrove dikawasan tersebut adalah pembagian kewenangan oleh Kepala Desa pada pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh kuat dan modal besar dalam penguasaan tanah-tanah Negara. Pembagian kuasa secara sepihak oleh Kepala Desa tersebut, telah menyebabkan terjadinya monopoli penguasaan area hutan mangrove untuk lokasi pertambakan oleh pihak-pihak tertentu, yang pada gilirannya semakin mengokohkan posisi mereka sebagai “tuan tanah” atau ponggawa-ponggawa besar di Muara Pantuan.

Pelepasan hak atas penguasaan lokasi pertambakan yang tidak prosedural dan tertib inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal terjadinya

banyak kasus tumpang tindih kepemilikan lokasi pertambangan di Desa Muara Pantuan. Pada periode tersebut terdapat indikasi terjadinya pamarjinalan peran dari tokoh-tokoh komunitas asli setempat dalam kehidupan sosio-ekonomi, tergantikan oleh para petambak yang telah "naik kelas" menjadi ponggawa. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya masyarakat lokal yang tidak berdaya secara ekonomi, menjadi client dari para ponggawa yang menguasai infrastruktur ekonomi Desa Muara Pantuan.

Penggabungan dari semua keadaan yang dihadapi masyarakat Muara Pantuan diatas, ternyata telah menciptakan sebuah kesenjangan dalam wujud kecemburuan sosial yang cukup tertutup antara penduduk asli dan pendatang, antara masyarakat hilir dan hulu. Gejala tersebut sering berkembang menjadi konflik horizontal dengan ponggawa lainnya, antara petambak dengan perusahaan migas, antara petambak dengan pemerintah setempat dan seterusnya. Begitu mendasarnya perubahan sosial yang terjadi di Desa Muara Pantuan, sehingga perangkat nilai yang dimiliki masyarakat mulai tidak mampu menjadi alat pemberi makna atas perubahan yang terjadi (Lenggono, 2004). Kondisi seperti ini oleh Emile Durkheim disebutnya sebagai anomie, situasi anomie selalu menyertai seberapa cepat dan besar perubahan yang terjadi serta proses penyesuaian masyarakat dalam pemberian makna atas perubahan tersebut. Situasi anomie bisa memunculkan perasaan tidak puas karena kehilangan kontrol terhadap situasi tertentu, menjadi pesimistis karena berada pada posisi yang tidak

menguntungkan, serta kehilangan kepercayaan terhadap setiap kelembagaan sosial yang ada.

Disisi lain akibat tuntutan reformasi, perusahaan migas yang beroperasi disekitar Muara Pantuan mulai mengucurkan dana charity yang "memanjakan" masyarakat setempat dengan berbagai macam bantuan yang cenderung membuat ketergantungan. Seperti mulai beraninya komunitas petambak Muara Pantuan untuk melakukan tuntutan pada perusahaan migas yang dianggap telah mencemari lahan tambak mereka dengan cara 'menyandera' fasilitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Cara-cara represif juga sering ditunjukkan masyarakat petambak setempat dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan lokasi pertambakan bahkan dalam urusan-urusan yang sepele. Masyarakat yang cenderung oportunistis dan apatis tersebut akan mudah tergelincir dalam "pemecahan masalah sesaat" dengan cara berjudi dan mengkonsumsi minuman keras bahkan narkoba. Disinyalir kondisi ini juga telah memarakkan praktek perjudian yang terorganisir di sekitar Desa Muara Pantuan. Adanya arus migrasi yang signifikan bisa dilihat dari data Total FinaElf Indonesia dalam "Recapitulation Data Of Family Economic Classification" pada bulan Desember 2002, dimana Desa Muara Pantuan yang saat itu hanya memiliki 451 KK dengan 1.916 jiwa penduduk, pada tahun 2003 menurut data P4B telah mengalami pertumbuhan sebesar 122 % menjadi 1.001 KK dengan 3.932 jiwa penduduk. Yang lebih mengejutkan adalah hasil temuan lapang di salah satu RT yang mengalami pertumbuhan hingga 831 % hanya dalam 8 bulan, dari 39 KK berkembang-biak menjadi 363 KK (Lenggono, 2004).

Para migran tersebut, tidak hanya berasal dari etnik Bugis dan Makassar di sekitar pantai timur Kalimantan dan Sulawesi, tapi juga etnik lain dari Sulawesi (Mandar dan Kaili), Timor, Flores, Madura serta Jawa (khususnya Lamongan) dan berbagai etnik lokal di pesisir pantai timur Kalimantan (Kutai, Tidung dan Banjar). Itulah gelombang migrasi yang terjadi kekawasan Delta Mahakam khususnya Desa Muara Pantuan. Para imigran yang datang dari berbagai suku dengan alasan tertentu seperti pekerjaan ataupun wabah yang pernah terjadi didesa atau kampung Pemangkar.

KESIMPULAN

Kawasan Delta Mahakam, khususnya Desa Muara Pantuan, telah menjadi tempat migrasi bagi berbagai suku dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Sulawesi, Timor, Flores, Madura, Jawa, dan etnik lokal di pesisir pantai timur Kalimantan. Meskipun kawasan ini telah memiliki peradaban sebelumnya, orang Bugis adalah yang pertama kali mengekspansi kawasan ini hingga ke pulau-pulau di dalam delta. Migrasi ini terjadi karena lokasi strategis, lahan yang subur untuk pertanian dan perkebunan kelapa, serta potensi perikanan yang melimpah. Selain itu, ada juga perpindahan penduduk dari Desa Pemangkar ke Muara Pantuan karena wabah penyakit yang menyebabkan banyak orang meninggal, mendorong mereka mencari tempat lain untuk bertahan hidup. Motivasi migrasi ke Delta Mahakam termasuk keinginan untuk menyelamatkan diri dari kekacauan ekonomi dan militer, seperti pemberontakan Kahar Muzakkar, serta nasehat dari sanak saudara atau teman yang mengetahui

lokasi potensial untuk pertanian dan perkebunan. Migrasi ini berlanjut hingga saat ini, terutama karena pengembangan kawasan ini melalui eksplorasi dan eksploitasi kegiatan migas, serta beroperasinya beberapa industri perikanan ekspor. Oleh karena itu, migrasi ke Delta Mahakam terutama dipicu oleh faktor ekonomi dan keberlanjutannya terkait dengan perkembangan ekonomi dan industri di kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Andaya, Leonard Y. (2004). Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17. Makassar: Ininnawa

Lenggono PS. (2004). Modal Sosial dalam Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Pada Komunitas Petambak di Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara). Bogor: SPs-IPB (Tesis tidak dipublikasikan).

Lenggono, PS. (2015). Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang. Yogyakarta: STPN Press

Lenggono, S. P. (2015). Pembentukan Pengusaha Lokal Dalam Industri Perikanan Di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2(01).

Lineton , J. (1975). An Indonesian Society and Its Universe: A Study of the Bugis of South Sulawesi (Celebes) and Their Role within a Wider Social and Economic System, University of London: Ph.D. Dissertation, Scholl of Oriental and African Studies.

Matullada. (1985). Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Orang Bugis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Pemprop Kalimantan Timur. (1992). Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa ke Masa.

- Sarapang, Simon Sirua. (2017). Migrasi Orang Bugis: Adaptasi Kemelayuan dan Stabilitas Sosial Ekonomi (Tinjauan Sejarah Sosial Ekonomi). <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsulsel/migrasi-orang-bugisadaptasi-kemelayuan-danstabilitassosialekonomi-tinjauan-sejarah-sosialekonomi/>. Diakses 01 Oktober 2023
- Sjamsuddin, H. (2007). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak
- Timmer, J. (2010). Being seen like the state: Emulations of legal culture in customary labor and land tenure arrangements in East Kalimantan, Indonesia. *American Ethnologist*, 37(4), 703-712.
- Vayda A.P and A. Sahur. (1996). Bugis Settlers in East Kalimantan, Kutai National Park: Their Past and Present and Some Possibilities, for Future, Bogor, CIFOR.